BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Rasio kemandirian kinerja pemeintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 dilihat dari nilai rasio untuk tiap tahun mengalami kenaikan meskipun masih ketergantungan sumber daya baik dari pemerintah pusat/propinsi. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis rasio kemandirian memiliki nilai sig0.000<0.05 berarti ada perbedaan rasio kemandirian antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.
2. Rasio efektifitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 dilihat dari nilai rasio untuk tiap tahunya yaitu berfluktuasi. Tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang nilai efektifitasnya terus naik atau terus turun dari tahun 2006-2010. Namun bersasarkan nilai rata-rata tiap Kabupaten/Kota menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan untuk tahun 2006-2010. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis rasio efektifitas memiliki nilai sig 0.009<0.05 yang artinya ada perbedaan rasio efektifitas antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.
3. Rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010 dilihat dari nilai rasio untuk tiap tahunya yang dapat dikatankan efisien hanya di tahun 2006 tetapi mencakup seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY. Sedangkan untuk tahun 2007-2010 tidak

efisien karena nilai rasionya diatas 100%. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis rasio efisiensi memiliki nilai sig 0.016>0.05 dan dapat diartikan bahwa ada perbedaan rasio efisien antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.

4. Rasio aktivitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY pada tahun 2006-2010

   a. Rasio belanja aparatur

      Dilihat dari hasil uji hipotesis rasio belanja aparatur memiliki nilai sig 0.782>0.05 dengan demikian dapat diartikan tidak terdapat perbedaan rasio belanja aparatur antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.

   b. Rasio belanja pelayanan publik

      Dilihat dari hasil uji hipotesis rasio belanja publik memiliki nilai sig 0.353>0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio belanja publik antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.

   c. Rasio DSCR

      Nilai rata-rata DSCR semua Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY di atas 2,5 hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY mampu melakukan pembayaran jika melakukan pinjaman. Sedangkan dilihat berdasarkan hasil uji hipotesis rasio DSCR memiliki nilai sig 0.022<0.05 dan dapat diartikan bahwa ada perbedaan rasio DSCR antar Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY antara tahun 2006-2010.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai factor, antara lain:

1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2006-2010.
2. Penelitian ini dilakukan hanya di Kabopaten/Kota di DIY
3. Menyangkut penggunaan tolok ukur kinerja yang dipergunakan. Dalam penelitian ini hanya menganalisis kinerja berdasarkan rasio keuangan yang merupakan aspek ekonomi saja. Sementara masih banyak faktor non ekonomis yang tidak dapat dimasukkan kedalam ukuran kuantitatif. Beberapa kinerja non ekonomis seperti teknologi dan sumber daya manusia.
4. Dalam penelitian ini Biaya yang digunakan untuk memungut PAD mencakup keseluruhan biaya Pemerintah Daerah, sehingga rasio efisiensi di Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY tidak ada yang efisien.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:

1. Menambah tahun penelitian agar mendapatkan gambaran kinerja pemerintah yang jelas.
2. Menambah sampel penelitian, tidak hanya di Provinsi DIY
3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Memasukan pula aspek-aspek non ekonomis yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja pemerintah daerah.
4. Memperbaiki Rasio Efisiensi dengan menggunakan biaya yang digunakan untuk memungut PAD sehingga dapat di lihat dengan jelas kinerja pemerintah